

Teknologi Dirgantara untuk Operasi Bantuan Kemanusiaan

Tonny Harjono
Kepala Staf TNI Angkatan Udara

Dinamika global terus bergerak diwarnai ketegangan politik dan rivalitas antarnegara besar. Pada saat yang sama, ancaman bencana alam tidak boleh diabaikan karena dampaknya tidak kalah destruktif.

Berada di cincin api Pasifik, Indonesia amat rentan terhadap bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, puting beliung, dan kekeringan, pun meningkat.

Situasi geografis dan dampak perubahan iklim mengharuskan Indonesia memiliki tingkat kesiapan tinggi dalam menghadapi bencana.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat respons terhadap bencana sekaligus mendorong keamanan inklusif di kawasan, TNI Angkatan Udara (TNI AU) menggelar Regional Air and Space Power Forum untuk pertama kali di Nusa Dua, Bali.

Forum ini bertujuan membahas perkembangan teknologi dirgantara terkini dan masa depan yang relevan dengan operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana atau *humanitarian assistance and disaster relief* (HADR).

Teknologi ini berfokus pada pengembangan *unmanned aerial vehicle* (UAV); platform mobilitas udara; *intelligence, surveillance, and reconnaissance* (ISR); dan teknologi satelit.

Bencana alam tidak mengenal batas negara sehingga kolaborasi internasional dalam HADR menjadi penting. Bahkan, kolaborasi itu jadi jembatan antarnegara, terlepas dari perbedaan politik, demi nilai-nilai kemanusiaan.

TNI sebagai pilar pertahanan negara, sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004, berperan dalam operasi militer selain perang, termasuk operasi HADR. Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.

Selain kemampuannya bergerak cepat ke sejumlah wilayah, kekuatan udara TNI AU memungkinkan respons lebih luas dan efisien.

Selama ini, TNI AU telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membantu penanggulangan bencana. Sebagai contoh, pada Mei 2024, Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU mengevakuasi lebih dari 100 warga dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang terdampak banjir dan tanah longsor.

Berkat dukungan aset udara, Kopasgat dapat menembus daerah terisolasi dan menyelamatkan nyawa. Selain itu ju-

ga memberikan bantuan medis kepada para korban.

Selain mendukung evakuasi, TNI AU juga berperan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Pesawat dan helikopter TNI AU kerap digunakan mencegah kebakaran hutan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC), memadamkan api, serta menyalurkan bantuan.

Helikopter TNI AU H225M/Caracal juga digunakan membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memadamkan api, membantu evakuasi, dan menyalurkan bantuan.

Adapun pesawat TNI AU C-130J Hercules digunakan untuk mengangkut bantuan dan berperan penting dalam misi-misi bantuan berskala besar. C-130J punya peran kunci dalam misi *air drop* bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Teknologi dan kolaborasi

Penggunaan teknologi satelit juga kian meningkat dalam operasi HADR untuk pemantauan jarak jauh dan komunikasi. Satelit *synthetic aperture radar* (SAR) memberi gambaran akurat meski kondisi visual tidak memungkinkan, seperti saat cuaca buruk atau pada malam hari.

Teknologi satelit juga mendukung komunikasi ketika infrastruktur komunikasi darat rusak akibat bencana. Saat gempa bumi dan tsunami Palu (2018), satelit Lapan-A2 menjaga komunikasi di daerah terdampak untuk memungkinkan warga berkomunikasi.

Perkembangan lain yang tak kalah penting dalam teknologi dirgantara untuk operasi HADR adalah penggunaan UAV/*drone*. UAV efektif dalam operasi tanggap darurat. Penggunaannya tidak terbatas pada medan perang, tetapi juga bermanfaat dalam operasi kemanusiaan.

Contohnya, setelah gempa bumi Nepal (2021), Pemerintah Nepal menggunakan UAV untuk memetakan daerah bencana dan menilai kondisi wilayah yang sulit diakses.

Penggunaan UAV mempercepat proses penilaian kerusakan dan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan di lapangan. UAV juga terbukti berguna dalam operasi pencarian dan penyelamatan.

Misalnya, setelah kecelakaan helikopter yang melibatkan Presiden Iran Ebrahim Raisi, UAV Bayraktar Akinci dari Turki digunakan untuk menemukan lokasi kecelakaan.

Hal ini menegaskan efektivitas UAV dalam meningkatkan kesadaran situasional dan

membantu pencarian di wilayah yang sulit diakses.

Selain teknologi, kolaborasi internasional juga merupakan elemen penting dalam operasi HADR, terutama ketika bencana terjadi secara lintas batas.

Kompleksitas operasi HADR sering membutuhkan beragam jenis kemampuan yang tidak dapat disediakan oleh satu negara saja. Di sinilah pentingnya peran kolaborasi internasional.

Indonesia memiliki pengalaman panjang bekerja sama dengan negara-negara sahabat. Salah satunya dalam operasi pencarian dan penyelamatan pascatsunami Aceh (2004).

Ketika itu, bantuan internasional memainkan peran penting dalam evakuasi korban dan upaya pemulih. Kehadiran mitra internasional memungkinkan tersedianya sumber daya dan kemampuan seperti mobilitas udara. Ini sangat krusial untuk mengirim bantuan ke wilayah yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.

Kolaborasi juga tecermin pada operasi penanggulangan bencana pascagempa bumi dan tsunami di Palu (2018). Kerja sama internasional dalam operasi HADR tidak sekadar berbagi sumber daya, tetapi juga berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Dalam jangka panjang, kerja sama ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan global dalam menghadapi bencana dan memperkuat kapasitas kolektif dalam merespons situasi darurat.

Bencana alam merupakan ancaman global yang melintasi batas negara. Dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas respons, negara-negara harus memanfaatkan teknologi terbaru di bidang kedirgantaraan dan antariksa, seperti UAV dan satelit.

Kolaborasi internasional menjadi kunci keberhasilan dalam operasi HADR karena tidak ada satu negara pun mampu menyiapkan dan menanggulangi bencana sendirian.

Melalui kerja sama, negara-negara dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan teknologi; meminimalkan dampak bencana; serta menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Dalam situasi darurat, setiap menit berarti berharga. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi dan kolaborasi lintas negara adalah solusi terbaik untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan global berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

Upaya presiden terpilih Prabowo Subianto mengajak semua pemimpin partai politik untuk bergabung dalam pemerintahan bisa menjadi pisau bermata dua.

Di satu sisi hal itu bermanfaat untuk menjalin kerja sama (gotong royong) dalam membangun bangsa. Di sisi lain, dalam konteks demokrasi, bisa menumpulkan fungsi kontrol lembaga legislatif.

Kalau kita menengok sejarah pascakemerdekaan, beberapa pekan setelah proklamasi, muncul gejala otoritarianisme yang ditandai dengan bersatunya dua kekuatan (eksekutif dan legislatif) di tangan presiden.

Gejala ini sangat wajar terjadi karena pada waktu itu, lembaga legislatif, baik MPR maupun DPR, belum terbentuk. Belum ada lembaga legislatif yang anggotanya dipilih rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis.

Apa yang terjadi saat itu, dengan suasana berbeda, muncul kembali pada era Orde Baru. Lembaga legislatif yang dipilih rakyat melalui pemilu sudah ada. Akan tetapi, karena pemilu tidak dijalankan secara demokratis, keberadaan lembaga legislatif yang dihasilkannya berada di bawah kendali presiden.

Meminjam ungkapan Iwan Fals dalam lagunya, "Surat buat Wakil Rakyat", anggota legislatif saat itu hanya menjadi "paduan suara" yang "hanya tahu nyanyian lagu setuju."

Demokrasi semu semacam inilah yang harus kita hindari di era Prabowo Subianto. Jangan sampai terjadi, karena semua partai bergabung (berkoalisi) dengan pemerintah, keberada-

Menjaga Fungsi Kontrol Lembaga Legislatif

Abd Rohim Ghazali

Senior Fellow Maarif Institute; Direktur Eksekutif Inisiatif Demokrasi untuk Semua (InDesa)

an lembaga legislatif kembali berada di genggaman eksekutif. Kembali menjadi *rubber stamp* yang hanya tahu nyanyian lagu setuju.

Dalam konteks demokrasi yang sehat, parlemen berperan penting sebagai lembaga pengawas (*checks and balances*) terhadap eksekutif. Menurut Miriam Budiardjo (1992:183), di antara fungsi DPR adalah mengontrol badan eksekutif, dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Fungsi kontrol ini bertujuan memastikan kebijakan pemerintah dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan publik.

Lembaga legislatif memiliki peran penting sebagai *checks and balances* terhadap kekuasaan eksekutif. Tanpa kontrol yang efektif, kekuasaan eksekutif dapat berpotensi menjadi otoriter dan korup.

Lembaga legislatif yang kuat dan independen adalah salah satu indikator penting dari demokrasi yang sehat dan mampu menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Fungsi pengawasan lembaga legislatif sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Oleh karena itu, fungsi pengawasan ini harus tetap terjaga dengan transparansi. Pengawasan ini perlu melibatkan partisipasi publik agar dapat mengontrol pemerintah secara efektif.

Salah satu fungsi kontrol yang sangat penting adalah mengawasi kebijakan keuangan (kebijakan fiskal) agar sejalan dengan kepentingan publik.

Tanpa fungsi kontrol ini, risiko penyalahgunaan anggaran

meningkat. Potensi terjadinya pemborosan atau korupsi juga semakin besar.

Sejumlah kendala

Menjaga fungsi kontrol legislatif tidaklah mudah. Ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain, pertama, tidak adanya partai oposisi di lembaga legislatif.

Seperti disinggung di awal tulisan ini, ketika lembaga legislatif dikuasai oleh eksekutif, maka bisa dipastikan fungsi kontrol DPR akan hilang. Alih-alih mengawasi, malah memberi legitimasi.

Kedua, adanya potensi konflik kepentingan. Setiap anggota DPR pasti memiliki kepentingan, baik secara pribadi, kelompok (konstituen), maupun korporasi (kartel).

Karena tidak memiliki alat kelengkapan untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan itu, anggota DPR akan bersandar pada kebijakan eksekutif (pemerintah) untuk mewujudkannya. Konflik kepentingan semacam inilah yang membuat anggota DPR tersandera dan tumpul di hadapan eksekutif.

Ketiga, lemahnya independensi anggota legislatif di hadapan partai politik. Alfred Stepan dalam *Problems of Democratic Transition and Consolidation* (1996) menggarisbawahi bahwa konflik kepentingan bisa menjadi hambatan serius jika anggota parlemen lebih loyal kepada partainya daripada kepada konstituen mereka.

Kendala lain adalah kurangnya pengetahuan yang memadai tentang bidang-bidang yang harus diawasi. Sesuai ketentuan, setiap anggota DPR akan menempati komisi-komisi yang terbagi atas bidang-bidang ter-

tentu. Tidak semua anggota DPR memahami dengan baik bidang-bidang pada komisinya. Meskipun ada fasilitas tenaga ahli, mereka tidak banyak membantu karena direkrut tidak berdasarkan keahlian, tetapi lebih karena balas jasa sebagai tim sukses.

Penguatan peran

Untuk menghadapi kendala ini, diperlukan penguatan peran lembaga legislatif melalui pelatihan, akses terhadap data dan informasi yang lebih baik, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan.

Hal yang tidak kalah penting adalah melalui pengembangan kapasitas anggota parlemen dalam memahami isu-isu kebijakan. Parlemen yang terampil dan berpengetahuan mampu menganalisis kebijakan dengan lebih mendalam dan kritis terhadap program pemerintah.

Untuk menjaga kemandirian, lembaga legislatif harus diperkuat melalui sistem kelembagaan yang bisa memastikan bahwa eksekutif tidak dapat mengintervensi atau mengontrol proses pengawasan parlemen. Ini termasuk perlunya regulasi yang menjamin kebebasan anggota legislatif dalam menjalankan fungsi kontrolnya.

Fungsi kontrol yang efektif akan memastikan eksekutif tetap bertanggung jawab, transparan, dan bekerja demi kepentingan rakyat.

Melalui penguatan kapasitas anggota legislatif, kemandirian institusi, serta keterlibatan publik dalam proses pengawasan, parlemen dapat menjalankan perannya sebagai pengawas yang efektif terhadap pemerintah.

Dengan demikian, penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pelaksanaan kebijakan pun diharapkan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Kepada Bapak/Ibu Yth,

Sebagai komitmen transformasi untuk dapat melayani nasabah melalui layanan perbankan, maka berdasarkan Surat OJK No S-236/PB.02/2024 pada tanggal 25 September 2024 perihal Keputusan Penetapan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama) PT Bank SMBC Indonesia Tbk, dengan ini kami sampaikan bahwa efektif sejak tanggal 2 Oktober 2024:

bank
btpn

SMBC A MEMBER OF
SMBC Group

PT BANK BTPN Tbk

telah berubah nama menjadi:

SMBC
BANK SMBC INDONESIA

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Sehubungan dengan perubahan ini, kami sampaikan bahwa:

- Seluruh perjanjian/kontrak dengan para Nasabah, Debitur, Kreditur, Mitra Usaha dan Vendor yang telah ditandatangani dan menggunakan nama PT Bank BTPN Tbk, masih tetap berlaku.
- Buku Cek, Bilyet Giro, Tabungan, Warkat, Bilyet Deposito, dan Properti yang memuat nama dan logo perseroan PT BANK BTPN Tbk masih dapat digunakan.
- Kartu Debit dan Kartu Kredit yang memuat nama dan logo perseroan PT BANK BTPN Tbk masih dapat digunakan untuk melakukan transaksi hingga masa berlaku kartu berakhir.
- Perubahan logo dan nama perseroan yang baru akan dilakukan secara bertahap. Logo dan nama perseroan yang baru tersebut akan digunakan di seluruh media komunikasi PT Bank SMBC Indonesia Tbk dengan pihak ketiga seperti kop surat, amplop, stempel perusahaan, *website*, *e-mail*, pengumuman di kantor cabang dan media terkait lainnya.

Dengan hormat,

Direksi

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan LPS.



SURAT KEPADA REDAKSI

Rubrik ini menerima surat Anda mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman Opini maupun pemberitaan Kompas, serta masalah-masalah sosial masyarakat dan konsumen yang tidak terselesaikan dalam prosedur formal.

Maksimal 300 kata atau 2.300 karakter. Surat pembaca dikirim kepada suratpembaca@kompas.id atau ke Redaksi Kompas, Jl Palmerah Selatan 21, Jakarta 10270 dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau pindaian identitas diri.

"Stockpile" Emas Bank Sentral

Dunia mengalami masa ketidakpastian dan volatilitas yang sangat tinggi. Tidak terkecuali bidang ekonomi. Kalau kita jeli, negara-negara yang pemerintahannya cerdas, bank sentral mereka menambah *stockpile* emas dari waktu ke waktu untuk dipakai sebagai jangkar kekayaan negara dan tulang punggung kekuatan nilai tukar mata uang mereka, langsung maupun tidak langsung. Bank sentral mereka termonitor aktif melakukan pembelian emas dari waktu ke waktu.

Sebut saja Amerika Serikat, China, dan India. Mereka sadar bahwa emas adalah *safe haven* pelindung kekuatan ekonomi negara. Mereka sadar, cadangan devisa berupa mata uang asing saja tidak cukup aman untuk mengamankan kekuatan ekonomi karena nilai mata uang selalu mengalami volatilitas, bahkan penurunan daya beli.

Akibat *stockpiling* emas yang mereka lakukan, harga emas mengalami lonjakan tinggi di atas 2.600 dollar AS per troy ons. Itu harga emas yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Akan halnya Indonesia, meski dikenal termasuk enam besar pemilik kandungan emas di buminya, *stockpile* emas yang disimpan Bank Indonesia (BI) jauh di bawah Amerika Serikat, China, dan India, bahkan lebih kecil daripada Lebanon.

Di pasar komoditas pun, tidak termonitor keaktifan BI menambah *stockpile* emas.

Sangat disayangkan kalau negara kita mempunyai *stockpile* emas yang tidak memadai. Di waktu-waktu sekarang ini, harga emas masih akan merambat naik. BI harus mempertimbangkan dengan serius untuk membuat strategi *stockpile* emas untuk ketahanan ekonomi Indonesia.

G EDWIN DEWAYANA
Petungkang Selatan, Jakarta Selatan

Kesebelasan "Garuda"

Dalam pembentukan kesebelasan "Garuda" atau tim nasional, untuk berlaga di kancah sepak bola internasional, saat ini banyak diambil pemain dari luar negeri. Mereka menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Kalau pemain asing yang memiliki darah keturunan Indonesia yang dinaturalisasi itu hanya satu atau dua, mungkin paling banyak tiga orang, masih bisa dipahami. Kalau kesebelasan kita itu menang, kita bangsa Indonesia sebagai pemilik kesebelasan tentu merasa bangga. Tetapi, kalau kebanyakan pemainnya orang asing yang dijadikan WNI, tentu rasa bangga itu akan sangat berkurang.

Sebenarnya saat ini pertandingan sepak bola internasional itu tujuannya untuk bisnis atau untuk apa? Maaf atas pertanyaan saya ini yang memang kurang mengikuti persepabolaan.

V SUTARMO SETIADJI
Utan Kayu, Jakarta Timur